

RESENSI BUKU

Politik Bangsa Malaysia

Data Buku

Politik Bangsa Malaysia
Pembangunan Bangsa Masyarakat
Majemuk
Mohamed Mustafa Ishak
Progressio
2016
vii + 358 hlm

PASCATRAGEDI huru-hara 1 Mei 1969, pemerintah Malaysia akhirnya membentuk undang-undang bahwa hanya Melayu-muslim yang berhak mendapatkan keistimewaan (*privileges*) dari negara sebagai Bumiputra. Alhasil, orang-orang Melayu mulai menguasai sektor-sektor bisnis dan posisi strategis di pemerintahan. Sementara etnik Tiongkok dan India menjadi warga negara kelas dua. Ribuan anak muda Melayu diberi kemudahan belajar ke luar negeri melalui peningkatan kuota beasiswa. Di dalam negeri, beberapa perguruan tinggi didirikan untuk memenuhi kebutuhan jenjang pendidikan tinggi bangsa Melayu.

Meskipun kebijakan tersebut dianggap *apartheid* tapi sebagaimana dikatakan Mahatir Mohamad dalam *The Malay Dilemma* (1970) bahwa bangsa Melayu adalah orang asli pribumi yang berhak mengklaim Malaysia. Orang Melayu ditakdirkan sebagai pewaris tanah Malaysia. Sedangkan para imigran adalah tamu sebelum mereka benar-benar bisa menyerap budaya pribumi—tidak boleh menjadi bagian dari ras lain.

Melalui kebijakan dasar ekonomi baru (DEB) yang berpihak pada orang Melayu membuat lanskap sosial-ekonomi masyarakat Malaysia pun berubah drastis. Ribuan anak-anak Melayu dari keluarga petani, nelayan, penyadap karet, guru, tentara, polisi, aparatus sipil, dan lain-

nya menjadi kelas menengah baru atau kapitalis baru (Hal. 120—121). Sebaliknya, etnik non-Bumiputera sejak saat itu mengalami keprihatinan sebab dianggap orang luar.

Persoalan berikutnya, kebijakan kebudayaan nasional Malaysia adalah menjadikan budaya Melayu dan Islam sebagai identitas nasional. Kebijakan ini mengabaikan aspek keragaman budaya karena hanya Islam sebagai agama nasional dan bahasa Malaysia sebagai bahasa nasional. Konsekuensinya, etnik non-Melayu kalau ingin menjadi warga asli Malaysia harus menghilangkan identitas keetnikannya. Artinya, jika orang-orang Tiongkok ingin menjadi Bumiputera, suka tidak suka harus mengurangi ke-Tiongkokannya. Begitu juga etnik India harus menanggalkan ke-Indiaannya. Namun, kedua komponen tersebut sulit diterima sebab mereka memiliki warisan kultural yang sama kuatnya. Buku berjudul *Politik Bangsa Malaysia: Pembangunan Bangsa Masyarakat Majemuk* memaparkan betapa peliknya hubungan antaretnik dan pembangunan bangsa di Malaysia.

Secara historis, persoalan pembangunan bangsa di Malaysia merupakan dampak kebijakan kolonialisme Inggris yang membawa komunitas non-Melayu, Tiongkok, dan India, untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan di sektor pertambangan timah, perkebunan karet, pusat-pusat komersial pelabuhan perdagangan, dan lain-lain. Akibat imigrasi besar-besaran dari kedua etnik tersebut mengacu hasil sensus

1931 jumlah orang-orang Melayu berada di bawah imigran. Menyadari kondisi demikian kaum terpelajar Melayu panik sehingga mendorong lahirnya nasionalisme Melayu (Hal. 61). Pada titik inilah menurut Mohamed Mustafa Ishak sebagai akar persoalan sosial pertarungan ideologi Bumiputera dan non-Bumiputera yang dimulai sejak akhir abad ke-19.

Nasionalisme Melayu.

Kehidupan politik orang Melayu menurut Ishak sebelum kemerdekaan tidak familier dengan konsep negara meskipun istilah “negeri Melayu” tidak asing bagi mereka. Dalam pikiran mayoritas orang-orang Melayu ketika itu, pengertian Melayu mengacu pada kerangka “kerajaan”. Dengan kata lain, orang-orang Melayu tidak memahami bahwa mereka hidup dalam dalam “negara” melainkan di bawah individu “raja.” Orang Melayu memiliki kesamaan budaya dan sejarah, negeri dan kerajaan sebagai kesatuan teritori, ekonomi agrokultur, tugas politik dan hukum sultan dan kerajaan (146). Itulah mengapa budaya politik parokial atau kesetiaan primordial pada negeri atau kerajaan kuat di Malaysia.

Dalam konteks di atas, kebangkitan nasionalisme Melayu muncul karena krisis identitas akibat penjajahan Inggris dan imigrasi Tiongkok dan India. Kemunculan kesadaran kolektif untuk mengembalikan bangsa Melayu menjadi bangsa berdaulat melawan penjajahan dan ancaman peminggiran dari komunitas imigran menemukan momentumnya pada 1930-an.

Meskipun demikian, gagasan konsep bangsa Melayu tidak pernah terealisasikan. Kegagalan ini setidaknya oleh dua faktor. Pertama, di kalangan gerakan nasionalis Melayu terjadi fragmentasi antara kelompok Melayu Kiri yang antikerajaan dengan kelompok konservatif yang memegang teguh institusi kemelayuan. Kedua, Pemerintahan kolonial dalam sensus 1947 tetap mengelompokkan orang Melayu sebagai komunitas etnik, seperti Tiongkok dan India. Pengelompokan ini terus digunakan hingga saat ini, tapi orang Melayu tetap menganggap diri mereka sebagai bangsa.

Sekilas, meskipun pengertian etnisitas dan kebangsaan di level akademik masih tumpang-tindih tapi perbedaan antara keduanya memiliki konsekuensi politik yang berbeda di Malaysia. Inilah yang menjadi persoalan bangsa Malaysia sebagai masyarakat majemuk. Sebab itu, Mahathir melalui gagasan bangsa Malaysia pada visi 2020 yang dicanangkan tahun 1991 mencoba mendamaikan permasalahan etnisitas dan nasionalisme ke dalam persatuan bangsa Malaysia sebagai mozaik dari kebudayaan yang berbeda-beda untuk menciptakan identitas nasional yang terdiri atas berbagai etnik. Namun, melihat realitas politik Malaysia hingga saat ini masih belum nampak kemajuannya mengingat pengelompokan etnisitas terlembaga kuat dalam sistem politik Malaysia. Buku ini menarik dibaca sebagai suatu perspektif alternatif memahami hubungan etnis dan pembangunan bangsa di Malaysia sehingga dapat memperjelas gambaran politik dan masyarakat Malaysia sebagai negara tetangga.

Moh Nizar

Dosen Hubungan Internasional FISIP Unila

